



RENSTRA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Periode 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda untuk 5 (lima) tahun ke depan, sehingga pencapaiannya bisa terukur.

Renstra Bapelitbangda disusun dengan berpedoman pada RPJMD 2021-2026 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, dan visi misi Kota Batam sebagaimana diamanatkan pada RPJMD 2021-2026.

Semua unit kerja, pimpinan dan staf Bapelitbangda memiliki konsekuensi untuk melaksanakan Renstra ini secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Tujuan Renstra Bapelitbangda, yaitu *“Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas,”* maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan serta perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Akhirnya Renstra sebagai dokumen perencanaan memerlukan penjabaran konkrit dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga keberhasilan pencapaian tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam Renstra tergantung pada komitmen segenap pimpinan dan staf Bapelitbangda untuk melaksanakan tugasnya secara optimal yang akhirnya bermuara pada kinerja Bapelitbangda yang baik.

Batam, Desember 2021

**KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN,
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH**



WAN DARUSSALAM
NIP. 196220416 198603 1 033

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR DIAGRAM.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	14
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	33
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	33
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	35
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	37
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	42
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	45
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	45

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	55
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN	69
BAB VIII PENUTUP.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Sarana Prasarana Bapelitbangda	20
Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dearah Bapelitbnagda Kota Batam	24
Tabel II.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Bapelitbangda Kota Batam	26
Tabel III.1 Misi, Tujuan dan Sasaran, Urusan dan Program RPJMD terkait dengan Peran Bapelitbangda	37
Tabel III.2 Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong pada Bapelitbangda dalam Pencapaian Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas	39
Tabel.III.3 Telaah RTRW dan KLHS.....	43
Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	46
Tabel V.1 Tujuan, Strategi dan Kebijakan	51
Tabel VI.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan PD Bapelitbangda Kota Batam.....	58
Tabel VII.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra	2
Gambar I.2 Hubungan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Baik Tingkat Pusat Maupun Daerah	7
Gambar II.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam	14

DAFTAR DIAGRAM

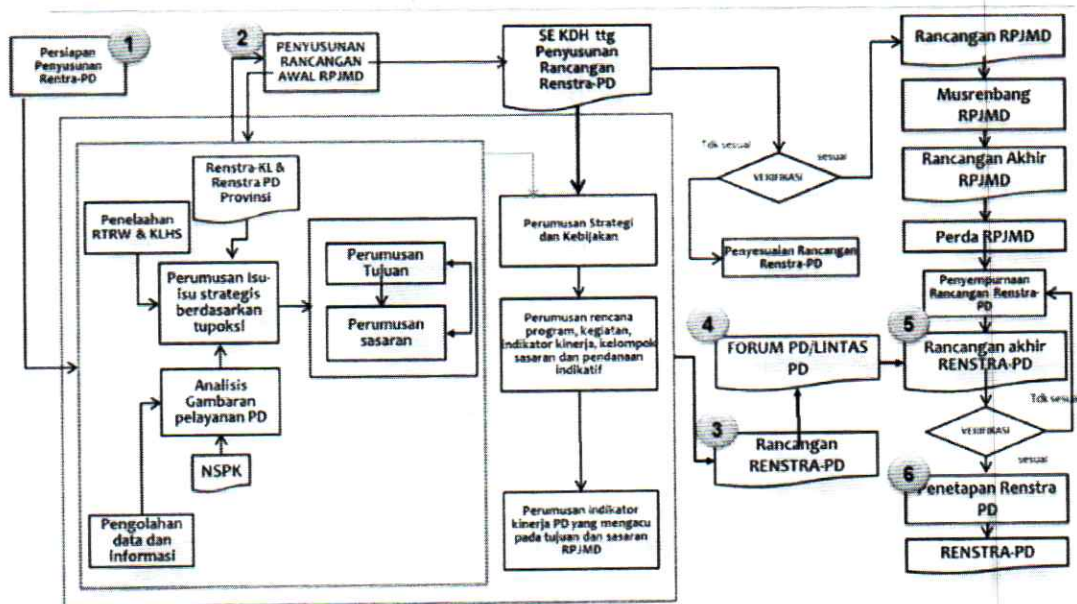
Diagram II.1 Jumlah PNS dan THL	15
Diagram II.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	16
Diagram II.3 Jumlah PNS Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	17
Diagram II.4 Jumlah THL Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	18
Diagram II.5 Jumlah Pegawai Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Berdasarkan Jenis Kelamin	19

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses penyusunan Rancangan Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rancangan RPJMD. Dalam hal ini Renstra Bapelitbangda Kota Batam disusun untuk digunakan pada masa perencanaan selama 5 tahun dengan mempertimbangkan RPJMD sebagai salah satu bagian komponen perencanaan di atasnya. Lebih jelasnya, bagan alir proses penyusunan Renstra sampai dengan proses ditetapkannya Renstra dapat dilihat pada Gambar 1. Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD:



Proses penyusunan Renstra Bapelitbangda dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Persiapan penyusunan Renstra
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra
3. Penyusunan Rancangan Renstra
4. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra
5. Penetapan Renstra

Persiapan penyusunan Renstra diawali dengan pembentukan tim penyusunan Renstra melalui Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah. Selanjutnya, orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.

Penyusunan Rancangan Awal Renstra dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud kemudian dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra

Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan selanjutnya ditetapkan menjadi Renstra Perangkat Daerah, paling lambat 1 bulan setelah Perda RPJMD ditetapkan.

Dalam kaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, maka Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan yang stratanya lebih tinggi dalam artian dokumen induk dari perencanaan di lingkungan Pemerintah Kota seperti dokumen RPJPD Kota Batam Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026 dan dokumen perencanaan lain yang bersifat vertikal seperti dokumen perencanaan nasional dan provinsi.

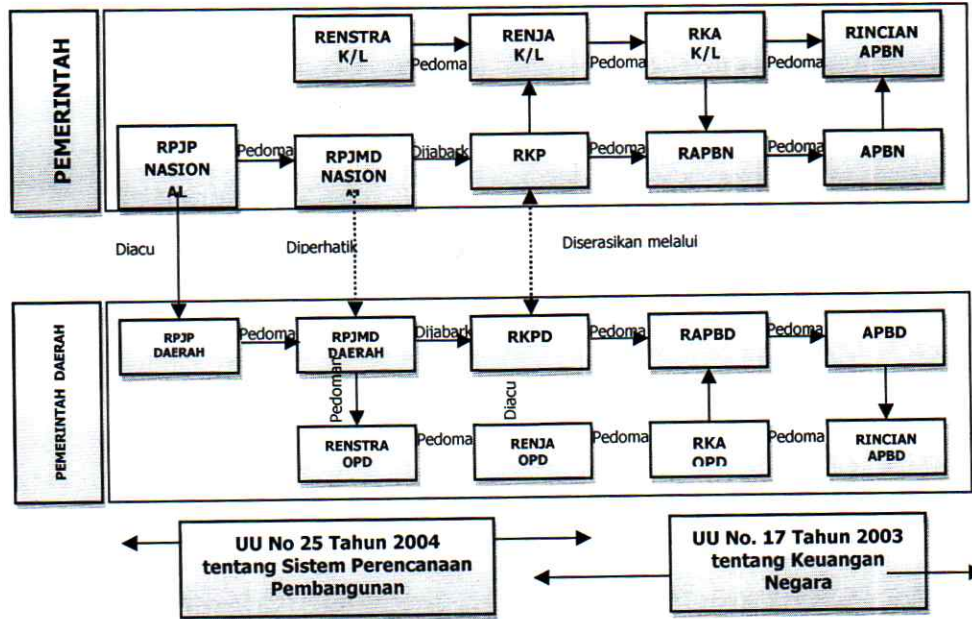
Renstra PD sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah, berhubungan erat dengan RKPD, RPJMD dan RPJPD. Selanjutnya, Renstra PD juga merupakan payung bagi dokumen perencanaan dibawahnya yaitu Rencana Kerja PD yang merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD setiap tahunnya yang selanjutnya akan menjadi rincian APBD.

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang bertingkat. Oleh karena itu Renstra PD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RenstraPD harus sinkron dan sinergi antar PD yang merupakan tugas Bapelitbangda dalam menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Dalam hal kaitannya dengan sistem keuangan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka Renstra PD akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja PD untuk setiap tahunnya, dan harus dijadikan pedoman bagi penyusunan RKA PD yang merupakan masukan untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Batam. Berikut ini diuraikan secara diagramatis kaitan antara Renstra PD dengan dokumen

perencanaan di tingkat pusat, dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dan turunan dari Renstra PD, serta perencanaan keuangan daerah.

Gambar I.2
Hubungan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Baik Tingkat Pusat
Maupun Daerah



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 119)
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2)
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor)
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor)

20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 127);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 784);
22. Peraturan ^{Wali km} Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah adalah untuk menentukan arah dan strategi kebijakan perencanaan pembangunan di instansi Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam selama periode 2021-2026 serta sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan perencanaan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan arah, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam setiap tahunnya.
2. Menjamin keterkaitan, konsistensi, sinergisitas, dan keterpaduan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga dalam menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
3. Meningkatkan kemampuan kelembagaan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam dalam upaya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program-program Pemerintah Kota Batam.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis pada Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah 2021-2026 ini terdiri atas 6 (enam) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian, pengembangan pembangunan daerah dengan tipe A.

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 62 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Daerah, susunan organisasi Bapelitbangda terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Analisis Pemerintahan, Ekonomi, sosial dan Budaya
 - b. Sub Bidang Analisis Kewilayahan dan Konektifitas
 - c. Sub Bidang Data, Perencanaan Program, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
4. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahi:
 - a. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM
 - c. Sub Bidang Pemerintahan
5. Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - a. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro
 - b. Sub Bidang Keuangan, Investasi Dan Pariwisata
 - c. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

6. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
 - a. Sub Bidang Penataan Ruang, Pertanahan dan Pengembangan Wilayah
 - b. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman
 - c. Sub Bidang Komunikasi, Informatika, Perhubungan, Statistik dan Persandian
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. KEPALA BADAN

Tugas Pokok: memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan kewenangannya.

- Fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Batam.
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Batam.
 - c. pembinaan dan pelaksanaan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Batam.
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.
 - e. penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian.
 - f. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan pembangunan
 - g. penyusunan rencana umum program dan kegiatan daerah di bidang data, penelitian dan kerjasama pembangunan, perencanaan sosial dan budaya, perencanaan ekonomi, dan perencanaan fisik dan prasarana sebagaimana visi dan misi Pemerintah Kota.
 - h. penyusunan rencana kerja tahunan, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang kota.
 - i. penyusunan bahan perencanaan pembangunan dalam rangka pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - j. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIAT

Tugas Pokok: melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas dibidang.

- Fungsi :
- a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja Badan.
 - b. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Badan.
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset.
 - d. pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan.
 - e. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
 - f. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

C. BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PERENCANAAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN

Tugas Pokok: melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

- Fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program lingkup Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan, dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

D. BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT

Tugas Pokok: melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Pembangunan Manusia dan Masyarakat

- Fungsi
- a. penyusunan rencana dan program lingkup Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
 - c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

E. BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

Tugas Pokok: melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam

- Fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
 - c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam

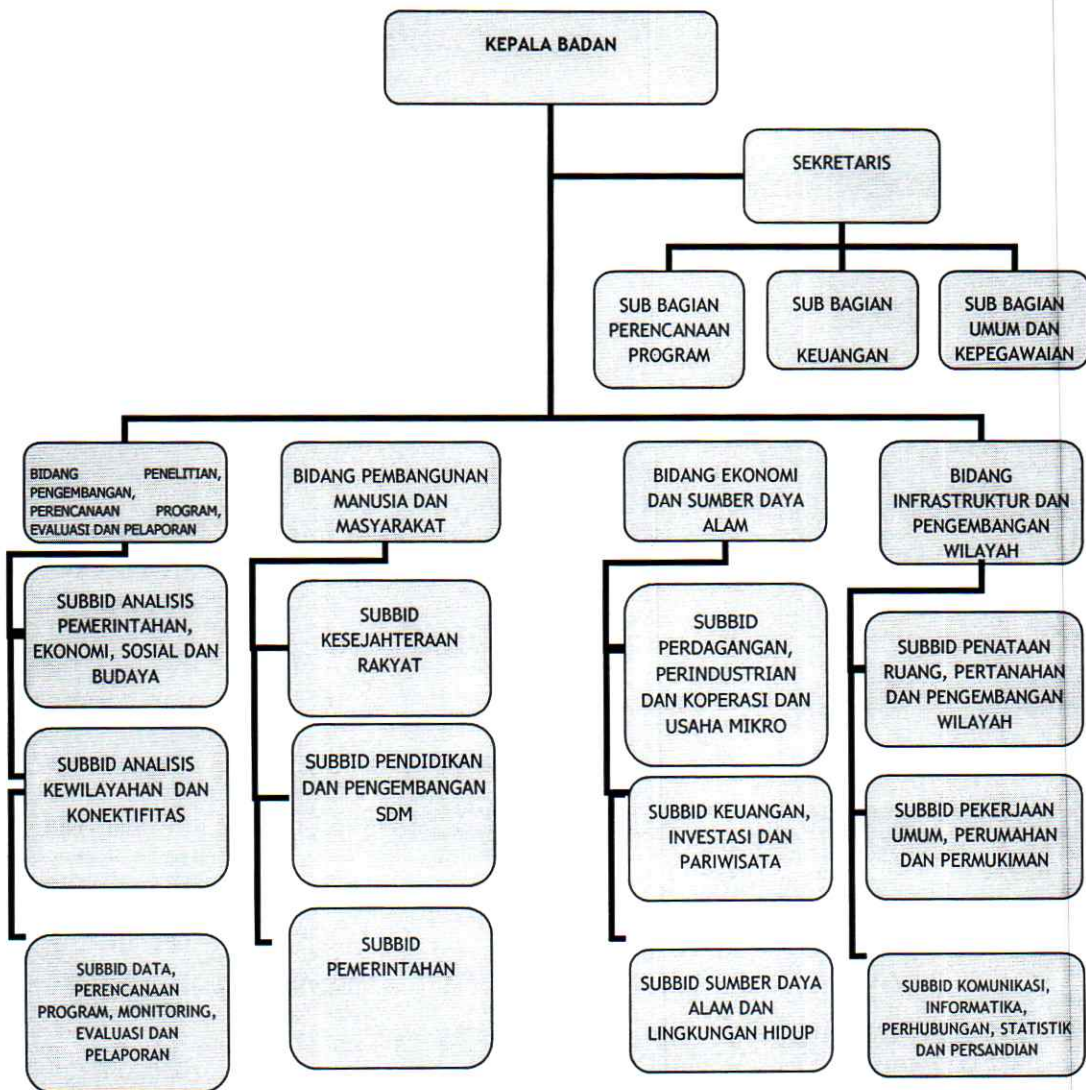
F. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Tugas Pokok: melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

- Fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
 - c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Gambar II.1

Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam

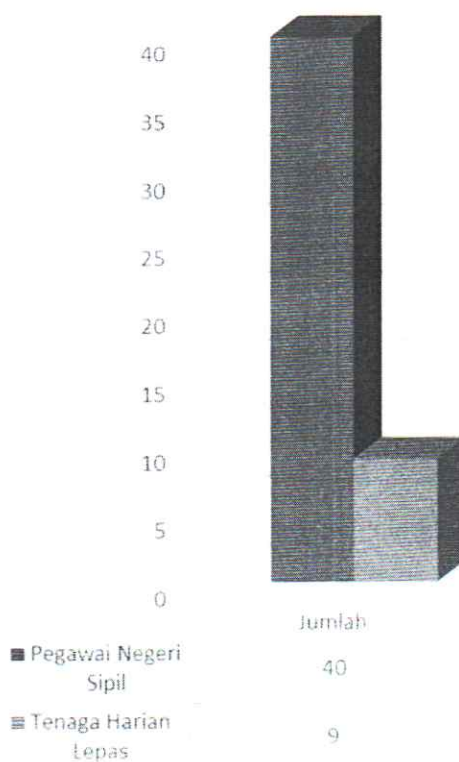


2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Bapelitbangda Kota Batam memiliki 40 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang Tenaga Harian Lepas untuk melaksanakan tugas pada Kantor Bapelitbangda Kota Batam, untuk melihat lebih jelas tentang jumlah komposisi pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Diagram II.1

Jumlah PNS dan THL

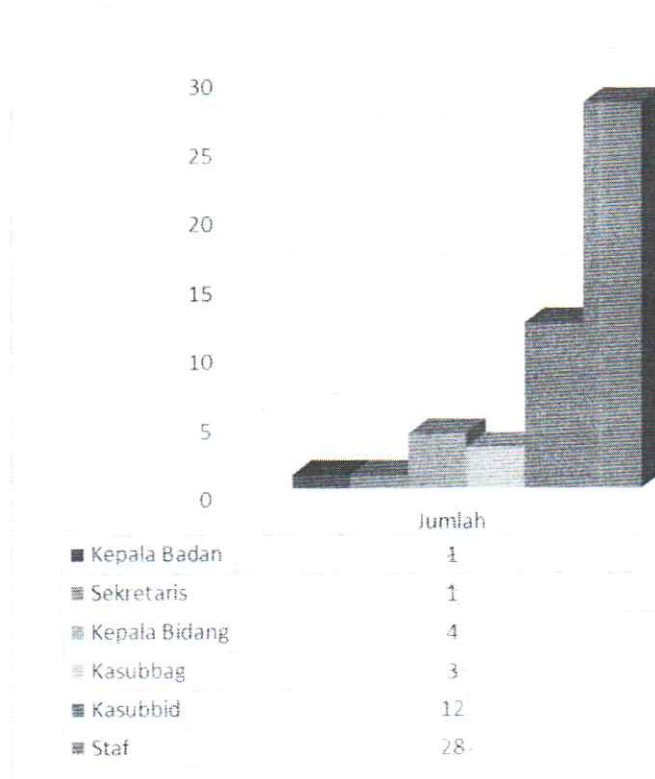


Sumber : Bapelitbangda Maret 2021

Dari jumlah pegawai sebanyak 49 orang terbagi pada setiap bagian sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Diagram II.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan



Sumber : Bapelitbangda Maret 2021

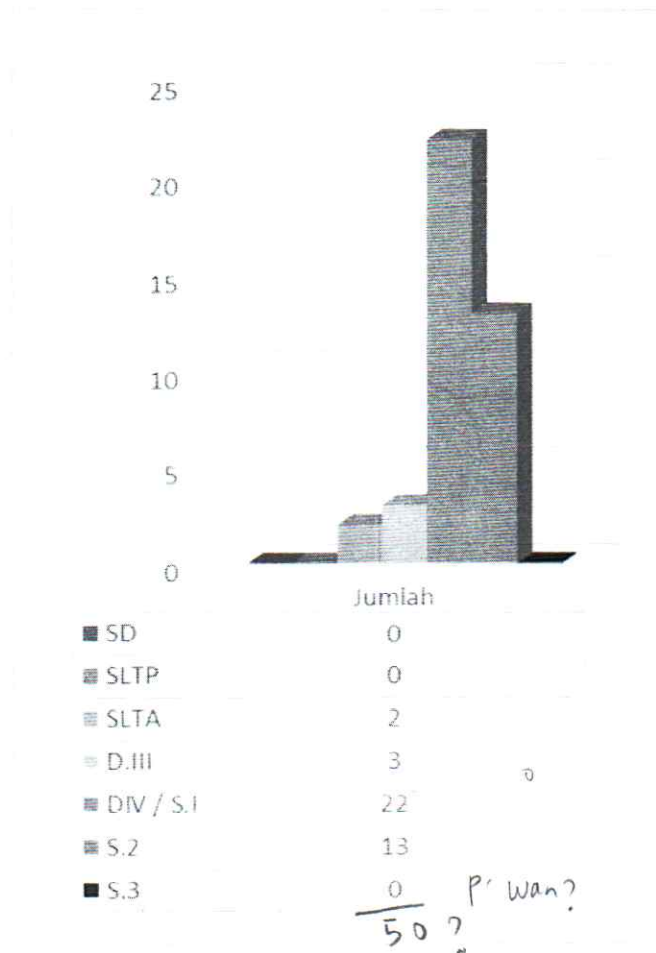
Setiap organisasi dewasa ini sudah menganggap Sumber Daya Manusia adalah suatu faktor yang mutlak dalam menjalankan roda organisasi tersebut, karena tanpa dengan adanya Sumber Daya Manusia yang terampil dan ahli maka susah dalam bersaing dalam era globalisasi.

Untuk melaksanakan berbagai tugas/pekerjaan latar belakang pendidikan pegawai akan dapat memberikan bantuan didalam melakukan pekerjaan, dimana pegawai yang berpendidikan relatif tinggi, biasanya akan lebih mudah untuk memahami beban tugas yang menjadi tanggung jawabnya bila dibandingkan dengan pegawai yang berpendidikan relatif rendah.

Latar belakang pendidikan pegawai akan memberikan bantuan pula terhadap usaha-usaha mengatasi berbagai kendala yang ditemui dalam melaksanakan pekerjaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Diagram II.3

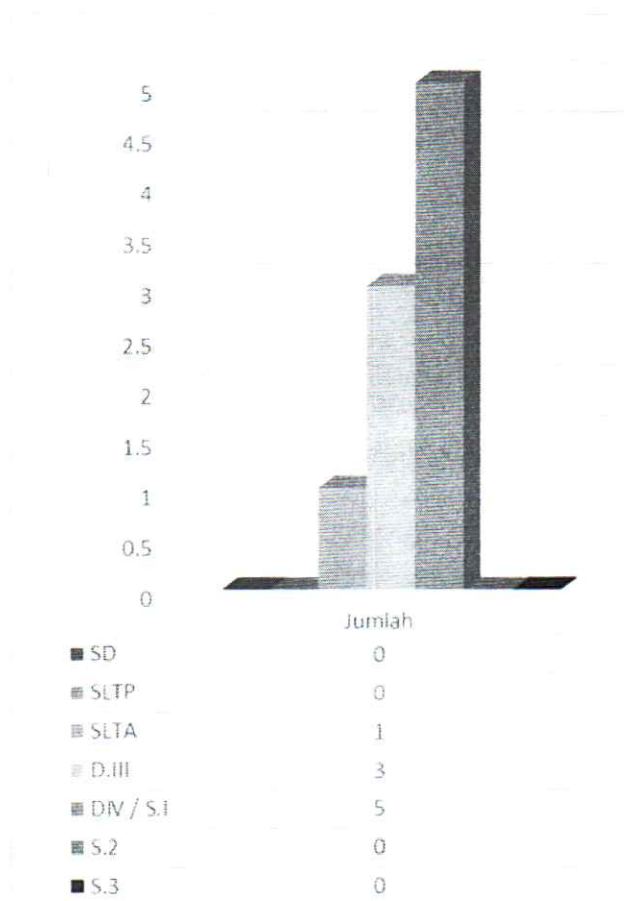
Jumlah PNS Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Bapelitbangda Maret 2021

Tabel II.4

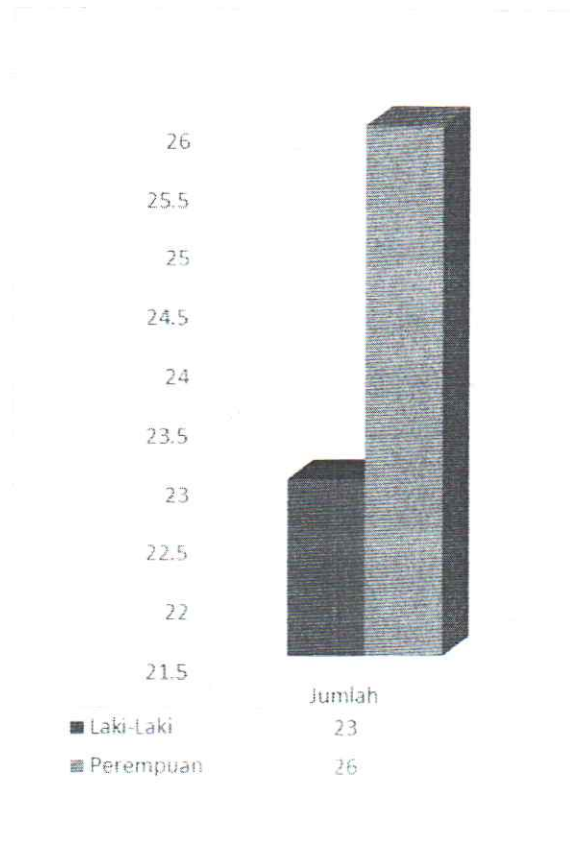
Jumlah THL Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Bapelitbangda Maret 2021

Diagram II.5

Jumlah Pegawai Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Bapelitbangda Maret 2021

Berdasarkan data kepegawaian di atas, seluruh jabatan di Bapelitbangda terisi oleh pejabat struktural. Namun, terdapat ketimpangan dari sisi ketersediaan staf, dimana dari 28 orang staf, terdiri dari 19 orang PNS dan 9 orang THL. Sehingga masih dibutuhkan penembahan staf untuk mendukung kelancaran tugas pada masing-masing kasubag/kasubid.

Secara kualitas, berdasarkan jenjang Pendidikan, sebagian besar PNS atau sebanyak 22 orang PNS Bapelitbangda memiliki tingkat Pendidikan S1 dan terdapat 13 orang dengan tingkat Pendidikan S2. Dengan latar belakang Pendidikan tersebut, sangat memberi dampak positif pada pelaksanaan tupoksi Bapelitbangda. Namun demikian, dengan perkembangan peraturan dan perubahan yang sangat dinamis pada kebijakan-kebijakan pemerintahan, maka kualitas SDM Perencana dan Litbang harus terus di *upgrade*, baik melalui diklat/bimtek/workshop dan lain-lain.

Tabel II.1
Sarana Prasarana Bapelitbangda

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN	KONDISI
I	SEKRETARIAT			
1	Kendaraan Roda 4	4 unit	1 Toyota Altis 1 Toyota Corolla 1 Toyota Avanza 1 Toyota Unser	Sedan 2 unit kondisi Baik Station Wagon 2 unit kondisi Baik
2	Kendaraan Roda 2	1 unit	Honda GL 15 A1 RR MT	Sepeda Motor 1 unit Kondisi Baik
3	Komputer	10 unit	Sekretaris : 1 unit Subbag Keuangan : 3 unit Subbag Program : 2 unit Subbag Umpeg : 2 unit Gudang : 2 unit	Kondisi baik 5 unit Kondisi rusak ringan 3 unit Kondisi rusak berat 2 unit
4	Laptop	6 unit	Subbag Keuangan : 5 unit Subbag Program : 1 unit Subbag Umpeg : 1 unit Gudang : 2 unit	Kondisi baik 6 unit Kondisi rusak ringan 1 unit Kondisi rusak berat 2 unit
5	Printer	22 unit	Sekretaris : 1 unit Subbag Keuangan : 3 unit Subbag Program : 3 unit Subbag Umpeg : 4 unit Gudang : 11 unit	Kondisi baik 11 unit Kondisi rusak berat 11 unit
6	Projector	3 unit	Ruang Rapat 2 unit Sekretaris 1 unit	Kondisi baik 2 unit Kondisi rusak ringan 1 unit
7	TV	2 unit	Ruang Rapat 1 unit Ruang Tamu 1 unit	Kondisi baik 2 unit
8	Camera DLSR dan Drone	3 unit	Kasubag Keuangan 2 unit Gudang : 1 unit (drone)	Kondisi rusak ringan 2 unit Kondisi rusak berat 1 unit (drone)
9	Brankas	1 unit	Kasubag Keuangan 1 unit	Kondisi baik 1 unit
10	Mesin Presensi	1 unit	Kasubag Umpeg 1 unit	Kondisi baik 1 unit
11	Scanner ADF	3 unit	Subbag Keuangan : 1 unit Subbag Umpeg : 1 unit Gudang : 2 unit	Kondisi baik 2 unit Kondisi rusak berat 2 unit
II	BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT			
1	Komputer	7 unit	Kasubid Kesra 2 unit Kasubid Pemerintahan 3 unit Kasubid PPSDM 2 unit	Kondisi baik 6 unit Kondisi rusak ringan 1 unit
2	Laptop	1 unit	Kabid PMM 1 unit	Kondisi baik 1 unit
3	Printer	7 unit	Kabid PMM 1 unit Kasubid Kesra 2 unit Kasubid Pemerintahan 2 unit Kasubid PPSDM 2 unit	Kondisi baik 7 unit
4	Projector	1 unit	Kabid PMM 1 unit	Kondisi baik 1 unit
III	BIDANG EKONOMI DAN SUMBERDAYA ALAM			
1	Kendaraan Roda 4	1 unit	1 Toyota Kijang	Kondisi rusak berat 1 unit
2	Kendaraan Roda 2	1 unit	Honda GL 15 A1 RR MT	Kondisi baik 1 unit
3	Komputer	5 unit	Kasubid KIP 1 unit Kasubid SDA LH 2 unit Kasubid PPKUKM 2 unit	Kondisi baik 5 unit
4	Laptop	1 unit	Kasubid KIP 1 unit	Kondisi baik 1 unit

5	Printer	5 unit	Kasubid KIP 2 unit Kasubid SDA LH 1 unit Kasubid PPKUKM 2 unit	Kondisi baik 5 unit
6	Camera Drone	1 unit	Kabid Ekonomi SDA	Kondisi baik 1 unit
IV	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH			
1	Kendaraan Roda 2	1 unit	Honda GL 160 D	Kondisi rusak berat 1 unit
2	Komputer	8 unit	Kabid IPW 1 unit Kasubid PUPR 2 unit Kasubid KPSP 2 unit Kasubid PRPPW 2 unit	Kondisi baik 7 unit Kondisi rusak ringan 1 unit
3	Laptop	3 unit	Kabid IPW 1 unit Kasubid PUPR 1 unit Kasubid PRPPW 1 unit	Kondisi baik 3 unit
4	Printer	3 unit	Kasubid PUPR 1 unit Kasubid KPSP 1 unit Kasubid PRPPW 1 unit	Kondisi baik 3 unit
5	Projector	1 unit	Kabid IPW 1 unit	Kondisi baik 1 unit
V	BIDANG PENELITIAN PENGEMBANGAN PRENCANAAN PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN			
1	Komputer	8 unit	Kabid Litbang 1 unit Kasubid Analisis PESB 2 unit Kasubid Analisis KK 2 unit Kasubid Data PPMEP 2 unit	Kondisi baik 7 unit Kondisi rusak ringan 1 unit
2	Laptop	2 unit	Kabid Litbang 1 unit Kasubid Analisis KK 1 unit	Kondisi baik 2 unit
3	Printer	4 unit	Kasubid Analisis PESB 1 unit Kasubid Analisis KK 1 unit Kasubid Data PPMEP 2 unit	Kondisi baik 4 unit
4	Scanner ADF	1 unit	Kabid Litbang 1 unit	Kondisi baik 1 unit
5	Projector	1 unit	Kabid Litbang 1 unit	Kondisi baik 1 unit

Berdasarkan data asset di atas, masih diperlukan penambahan sarana kantor dalam menunjang kelancaran tupoksi SDM Bapelitbangda, terutama berupa komputer, laptop, scanner dan printer.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan perencanaan pembangunan dengan fokus pada : (1) Perumusan kebijakan, (2) Bimbingan, Konsultasi, dan Koordinasi (3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan (4) Urusan Penelitian dan Pengembangan.

Tabel II.2 /T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bapelitbangda
Kota Batam

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM/IKK	Target Renstra PD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
	Program Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah		100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-			
	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah		100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-			
	Program perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang		100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-			
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-			
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-			
	Persentase Hasil Musrenbang yang diakomodir RKPD			45.0%	50.0%	55.0%	60.0%		61.13%	50.00%	55.0%	55.0%		135.8%	100.0%	100.0%	91.7%			

	Persentase Hasil RKPDP yang diakomodir APBD	90.0%	92.0%	94.0%	96.0%	85.4%	98.6%	98.57%	100.0%	94.9%	107.2%	104.9%	104.2%
Jumlah Kajian/ Penelitian yang mendukung pembangunan	3	4	4	4	4	1	0	0	2	33.33	0.00	0.00	50.00

Dari tiga indikator Bapelitbangda, 2 indikator perencanaan dapat dilaksanakan dengan sangat baik.

1. Indikator ke-1 1: Persentase Hasil Musrenbang yang diakomodir RKPDP Sesuai tabel di atas, capaian indikator sangat baik.

2. Indikator ke-2 : Persentase Hasil RKPDP yang diakomodir APBD Sesuai tabel di atas, capaian indikator sangat baik.

3. Indikator ke-3: Jumlah Kajian/ Penelitian yang mendukung pembangunan

Pada indikator kelitbang angka capaian kinerjanya masih rendah. Pada tahun 2018 dan 2019 tidak dilaksanakan kajian/penelitian dikarenakan adanya keterbatasan APBD Kota Batam sehingga perlu dilakukan prioritas program, namun pada tahun 2020 terealisasi kajian/penelitian yang mendukung pembangunan. Dalam perspektif ke depan Kota Batam perlu terus menstimulasi proses penelitian dan pengembangan untuk menciptakan inovasi inovasi dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tabel II.3/ T-C 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bapelitbangda
Kota Batam

Uraian *)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019 (5)	2020 (6)	2016 (7)	2017 (8)	2018 (9)	2019 (10)	2020 (11)	2016 (12)	2017 (13)	2018 (14)	2019 (15)	2020 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Program Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah	1,979,830,513.00	-	-	-	-	1,858,963,119.00	-	-	-	-	93.895	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bappeda	1,979,830,513.00	-	-	-	-	1,858,963,119.00	-	-	-	-	93.895	-	-	-	-	-	-
Program Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah	339,900,000.00	-	-	-	-	327,650,000.00	-	-	-	-	96.396	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	339,900,000.00	-	-	-	-	327,650,000.00	-	-	-	-	96.396	-	-	-	-	-	-
Program perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	230,270,000.00	-	-	-	-	125,104,670.00	-	-	-	-	54.33	-	-	-	-	-	-
Pemantauan Pemanfaatan Ruang Kota Batam	147,460,000.00	-	-	-	-	91,728,670.00	-	-	-	-	62.206	-	-	-	-	-	-

Pendampingan Pembahasan Raperda dan Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam	82.810.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.376.000,00	-	-	-	-	-	40.304	-	-	-	-	-	-	-
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	2.351.509.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.916.568.111,00	-	-	-	-	-	81.504	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan KUA, PPAS Tahun Berikutnya dan Penyusunan Perubahan KUA, Perubahan PPA Tahun Berjalan	326.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	175.136.114,00	-	-	-	-	-	53.624	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan	430.690.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	264.098.500,00	-	-	-	-	-	61.32	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Kemiskinan Kota Batam	186.090.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	147.792.700,00	-	-	-	-	-	79.42	-	-	-	-	-	-	-

Rancangan Akhir Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah 2021-2026

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	3.835.942,060	2.279.767,900	2.655.660,952	1.537.396,400	-	3.412.102,582	2.105.095,598	2.585.409,495	1.456.708,050	-	89,0	92,3	97,4	94,8	(255,393,963)	(217,266,060)
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	3.835.942,060	2.279.767,900	2.655.660,952	1.537.396,400	-	3.412.102,582	2.105.095,598	2.585.409,495	1.456.708,050	-	89,0	92,3	97,4	94,8	(255,393,963)	(217,266,060)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	515,076,323	113,433,000	182,461,136	226,500,000	-	475,735,000	101,887,000	174,571,136	191,775,000	-	92,4	89,8	95,7	84,7	(32,064,037)	(31,551,112)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	515,076,323	113,433,000	182,461,136	226,500,000	-	475,735,000	101,887,000	174,571,136	191,775,000	-	92,4	89,8	95,7	98,7	(47,341,815)	(43,094,723)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	506,485,000	426,027,500	331,442,500	120,192,400	-	466,012,500	374,347,500	331,442,500	115,026,400	-	92,0	87,9	100,0	95,7	(42,921,401)	(38,998,457)
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam	-	367,450,000	229,385,000	241,672,500	21,170,000	-	355,672,500	226,035,000	241,672,500	17,404,000	-	96,8	98,5	100,0	82,2	(38,475,557)	(37,585,390)
Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam	-	55,875,000	125,645,000	42,000,000	57,162,400	-	48,000,000	83,095,000	42,000,000	56,762,400	-	85,9	66,1	100,0	99,3	143,043	973,599
Penyusunan KUA-PPAS Tahun Berikutnya dan Penyusunan Perubahan KUA-PPA Tahun Berjalan	-	61,160,000	9,000,000	10,000,000	-	-	57,965,000	9,000,000	10,000,000	-	-	94,8	100,0	100,0	#VALUE!	#VALUE!	(5,329,445)

Rancangan Akur Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah 2021-2026

Koordinasi dan Sinkronisasi Kemiskinan Kota Batam	-	22,000,000	61,997,500	37,770,000	-	-	4,375,000,000	56,217,500,000	37,770,000,000	-	19.9	90.7	100.0	#VALUE!	#VALUE!	3,710,555
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	-	-	-	-	27,360,000	-	-	-	-	27,360,000	#####	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	3,039,999
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Batam	-	-	-	-	14,500,000	-	-	-	-	14,500,000	#####	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	1,611,110
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	374,611,250	100,000,000	17,650,000	249,422,802	-	343,066,250	86,237,780	17,650,000	196,263,663	91.6	86.2	100.0	#VALUE!	(13,909,829)	(16,311,400)
Pengembangan Sistem e-planning	-	295,450,000	100,000,000	17,650,000	-	-	275,618,000	86,237,780	17,650,000	-	93.3	86.2	100.0	#DIV/0!	(32,827,779)	(30,624,223)
Kajian Teknokratik RPJMD	-	-	-	-	180,494,904	-	-	-	-	127,336,265	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	20,054,988	14,148,473
Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SiDa) Kota Batam	-	-	-	-	68,927,898	-	-	-	-	68,927,398	#####	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	7,658,599
Penyusunan Dokumen Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	-	79,161,250	-	-	-	-	67,448,250	-	-	-	85.2	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	(7,494,251)

Berdasarkan tabel diatas rasio anantara realisasi dan anggaran pada 4 tahun RPJMD Kota Batam menunjukkan angka positif. Dimana berada diatas 90%, kecuali anggaran pada satu program, yaitu program penelitian dan pengembangan daerah. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian anggaran pada program dimaksud yang disebabkan oleh penurunan APBD tahun berkenaan.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan serta kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappelitbang Kota Batam:

2.4.1 Tantangan

Sesuai dengan capaian kinerja dan serapan anggaran yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan pembangunan di Kota Batam tahun 2016-2021, maka terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Bapelitbangda Kota Batam dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan untuk menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Tantangan tersebut antara lain :

1. Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran;
2. Data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya bisa digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses perencanaan;
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan secara berkala ditingkat PD untuk mengarahkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan maupun sebagai feedback bagi perencanaan pembangunan daerah periode selanjutnya.

2.4.2 Peluang

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Bapelitbangda Kota Batam dalam melaksanakan perencanaan, pengendalian pembangunan dan penelitian serta pengembangan pembangunan antara lain :

1. Diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041, sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah, sebagai dasar lokasi investasi dalam wilayah perkotaan yang dilakukan pemerintah, swasta dan masyarakat.
2. Terbitnya Permendagri 86 Tahun 2017 memungkinkan peningkatan sinergitas dan sinkronisasi perencanaan dan pengendalian Kabupaten Kota dengan Provinsi;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bapelitbangda masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih lemahnya kualitas indikator kinerja outcome dan impact yang digunakan sebagai tolak ukur kinerja perangkat daerah Kota Batam;
2. Masih lemahnya kelengkapan dan validitas data realisasi indikator kinerja pembangunan;
3. Pelaksanaan evaluasi baru sebatas realisasi anggaran, belum melakukan evaluasi dengan pendekatan gap analysis yang membandingkan (1) realisasi anggaran kegiatan dengan output fisik kegiatan; (2) realisasi anggaran per program dengan masing-masing indikator outcome program; (3) realisasi indikator impact dengan realisasi outcome program nya;
4. Persentase pencapaian sasaran daerah pada tahun 2019 hanya sebesar 70 persen;

5. Masih lemahnya data dan informasi yang menggambarkan kinerja penelitian dan pengembangan di Pemerintah Kota Batam;
6. Belum optimalnya anggaran di bidang Penelitian dan Pengembangan
7. Masih rendahnya pemahaman aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Batam terhadap peraturan perundang-undangan yang sangat dinamis yang menjadi dasar penyusunan perencanaan.
Peraturan perundang-undangan yang mengatur dan mengikat dalam penyusunan perencanaan yang terkadang sering berubah-ubah membuat sebagian aparatur perencana sulit memahaminya.
8. Belum optimalnya sumber daya aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
Kuantitas dan kualitas aparatur memegang peranan penting untuk melaksanakan tugas perencanaan.
9. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
Dengan belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi tiap-tiap aparatur perencana di lingkungan Pemerintah Kota Batam akan berpotensi menimbulkan permasalahan dan kendala dalam menyusun dan melaksanakan dokumen perencanaan.
10. Belum tersedianya sistem data dan informasi yang akurat.
Ketersediaan sistem data dan informasi sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi serta memonitoring perencanaan yang sedang dijalankan. Adanya sistem informasi dan data yang akurat akan mempermudah aparatur perencana pada Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya.
11. Situasi dan kondisi lingkungan yang sangat cepat berubah pada Kota Batam sangat mempengaruhi pada penyusunan rencana oleh Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah. Terutama halnya pada Kota Batam yaitu adanya perubahan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat sehingga menjadi masalah tersendiri dalam menyusun rencana.
12. Secara umum, perlu dilakukan upgrade kemampuan SDM Perencana, agar memberi kontribusi positif bagi perencanaan pembangunan daerah, baik berupa bimtek/workshop/pelatihan dll.
13. Keterbatasan sarana dan prasarana kantor perlu mendapat perhatian, agar tidak menghambat proses pekerjaan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Batam dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi Pembangunan Kota Batam Tahun 2021-2026:

“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”.

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:

Bandar Dunia : Dimaknai sebagai kota diarahkan menjadi kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis yang berpotensi menjadi "center of excellence".

Madani : Mengarahkan masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi, berbanding lurus dengan konsep civil society.

Modern : Dimaknai sebagai sikap, cara berfikir, dan cara bertindak yang produktif, berdaya saing, mandiri, terampil dan inovatif dengan mengedepankan tatanan sosial yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

Sejahtera : Dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin meliputi kondisi yang baik di tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan, rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensi ada.

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya- upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi Pertama, Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan, dengan strategi :

1. Mempercepat pemulihan ekonomi terdampak Covid-19 melalui Penguatan UMKM dan Industri serta peningkatan investasi.

2. Meningkatkan aktivitas perekonomian bagi Usaha Besar, UMKM dan IKM.
3. Meningkatkan Pelayanan Investasi dan Kemudahan Berusaha.
4. Mendorong percepatan dan fasilitasi Pelaksanaan KEK bersama BP Batam.
5. Menyusun Perencanaan Kegiatan Investasi Skala Besar, Sedang dan Kecil berdasarkan RTRW Kota Batam.

Misi Kedua, Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan, dengan strategi :

1. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur, utilitas, dan pengendalian banjir.
2. Menyediakan sistem transportasi perkotaan yang aman dan ramah lingkungan.
3. Meningkatkan pemanfaatan, penataan dan pengendalian ruang kota yang terintegrasi.
4. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, asri, ramah, aman, dan nyaman.

Misi Ketiga, Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia, dengan strategi:

1. Meningkatkan pemerataan sektor pendidikan dan kesehatan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga didik dan tenaga medis.
4. Memperkuat pendidikan vokasi dan kompetensi.
5. Meningkatkan pelestarian dan peningkatan nilai-nilai agama, seni dan budaya.
6. Meningkatkan penyediaan fasilitas kepemudaan dan keolahragaan.

Misi Keempat, Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland, dengan strategi:

1. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar di kawasan hinterland
2. Mengembangkan kawasan hinterland sebagai penopang kawasan ekonomi.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan di bidang ekonomi, sumber daya manusia, dan legalitas lahan.

Misi Kelima, Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien, dengan strategi:

1. Membangun sistem dan aplikasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis E-Government yang profesional, akuntabel, transparan, efektif, responsif dan berkualitas.
2. Membangun struktur kelembagaan yang efektif, efisien dan berkualitas.
3. Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan kinerja dan motivasi ASN
5. Memberikan tambahan insentif sesuai beban tugas dan kemampuan daerah.

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan perencanaan dan penelitian, pengembangan, maka Bapelitbangda adalah koordinator dalam penyusunan rencana kerja seluruh Perangkat Daerah dalam tercapainya seluruh aspek dari visi dan misi Walikota 2021-2026.

Jika membaca dari misi diatas, maka Bapelitbangda secara tulus memangku **Misi Kelima**, yaitu *Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien dengan strategi, membangun struktur kelembagaan yang efektif, efisien dan berkualitas.*

Tantangan dari pelaksanaan misi ini adalah Bapelitbangda secara institusi harus mumpuni secara kelembagaan sebelum menjalankan tugasnya sebagai koordinator perencanaan. Tentunya hal ini harus didukung dengan SDM yang berkualitas dan berkomitmen maju, serta sarana prasarana yang baik dalam mendukung proses pekerjaan.

Tabel III.1 Misi, Tujuan dan Sasaran, Urusan dan Program RPJMD terkait dengan Peran Bapelitbangda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Nilai LPPD	1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Dalam rangka mengintegrasikan, dan mensinergikan perencanaan antara pusat dan daerah maka diperlukan penyandingan antara sasaran pada Renstra KL, yaitu Bappenas dan Renstra Provinsi, yaitu Bappeda Provinsi Kepulauan Riau dan Renstra Bapelitbangda Kota Batam.

Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah:

“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berkualitas :

1. perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing;
2. produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah; dan
3. kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip good and clean governance.

Kredibel : perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (evidence based) dengan mekanisme pelaksanaan (delivery mechanism) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

Misi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Misi-1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Misi-2 : Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

Tujuan pada Misi-1 terdiri dari:

Tujuan-1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.

Tujuan-2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Misi-2

Tujuan-3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Tabel III.2

Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong pada Bapelitbangda dalam Pencapaian Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Tujuan Bappenas	Renstra	Tujuan Bappeda Provinsi Kepri	Tujuan Bapelitbangda Kota Batam	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
					Penghambat	Pendorong
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.	Renstra	Terwujudnya Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Penelitian dan Pengembangan	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	1. Masih rendahnya tingkat keselarasan dokumen perencanaan daerah baik antara RKPD dengan RPJMD, renstra dan renja, renstra dan RPJMD. 2. Masih lemahnya kualitas indikator kinerja outcome dan impact yang digunakan sebagai tolak ukur kinerja	1. Kapasitas dan kompetensi SDM Perencana masih kurang. 2. Prosedur mekanisme kerja yang dimiliki (Business Process dan SOP) yang telah disusun belum diimplementasikan dengan baik	1. Adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan 2. Kian meluasnya akses informasi yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun perencanaan
Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.						3.
Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.						

		<p>perangkat daerah Kota Batam</p> <p>3. Masih lemahnya kelengkapan dan validitas data realisasi indikator kinerja pembangunan</p>	<p>3. Belum optimalnya upaya-upaya otomatisasi kerja berbasis internet (IOT/Internet of Thing) bidang perencanaan pembangunan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan pemanfaatan data dan informasi.</p> <p>4. Masih kurangnya jumlah pegawai fungsional perencana dan fungsional peneliti guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian</p>	<p>4. Regulasi Tentang Sistem Pembangunan Nasional</p> <p>5. Regulasi Tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>6. Regulasi Tentang SPM</p> <p>7. Regulasi Tentang Sdgs Dan Perencanaan Sektoral</p> <p>8. Regulasi Tentang IKU Dan IKK</p> <p>9. Regulasi Tentang Pelaporan Dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah</p> <p>10. Regulasi Tentang Tata Ruang Dan KLHS</p> <p>11. Kebijakan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang SIPD</p> <p>12. Kebijakan Permendagri 90 Tahun 2019 Jo</p>
--	--	--	--	--

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 memuat pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang menghasilkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis kota dalam jangka waktu 20 tahun. RTRW Kota berfungsi sebagai:

- a. Acuan penyusunan RPJPD;
- b. Acuan RPJMD;
- c. Acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah kota;
- d. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pemnagunan dalam wilayah kota;
- e. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- f. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota;
- g. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, kesesuaian kegiatan pemenafaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
- h. Acuan dalam administrasi pertanahan.

Keselaran tugas dan fungsi Bapelitbangda dalam menyelenggarakan kebijakan teknis penataan ruang akan dilakukan secara bersama-sama dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melalui pengembangan sistem informasi rencana tata ruang dan foto udara serta peninjauan kembali RTRW dan RDTR.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dokumen KLHS RPJMD adalah untuk memastikan prinsip- prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kota Batam 2021-2026, serta untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin kemampuan, keselamatan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang melalui RPJMD. Adapun tujuan penyusunan KLHS RPJMD Kota Batam adalah sebagai berikut:

- a. analisis kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), untuk memberikan gambaran kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (permasalahan, isu strategis) sebagai dasar untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan.
- b. perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan (PB), berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian (target pencapaian) tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan

dan/atau dengan upaya tambahan sesuai periode RPJMD, dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tabel.III.3 Telaah RTRW dan KLHS

No.	Materi Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program	Kriteria Dampak/Risiko LH							Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	+	+	+	+	+	+	+	<2 kriteria negatif, tidak perlu KLHS
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	+	+	+	+	+	+	+	<2 kriteria negatif, tidak perlu KLHS
3.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	+	+	+	+	+	+	+	<2 kriteria negatif, tidak perlu KLHS

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, isu tugas dan fungsi Bappeda, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Bapelitbangda dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Masih perlu ditingkatkan kualitas fungsi pembinaan terhadap perangkat daerah terkait kualitas perencanaan di seluruh perangkat daerah Kota Batam (ketepatan perencanaan kegiatan dengan permasalahan, ketepatan arsitektur kinerja OPD, menjamin kualitas pelaksanaan monev di masing-masing OPD);
2. Perlu dilaksanakannya sistem evaluasi kinerja yang holistik pada setiap jenjang dokumen perencanaan yang berfokus pada evaluasi anggaran kegiatan, output fisik, outcome program dan impact sasaran daerah;
3. Perlu digunakannya hasil-hasil evaluasi sebagai basis menyusun perencanaan;
4. Pelaksanaan pendekatan penyusunan perencanaan yakni tematik, holistik, integratif, spasial perlu digunakan secara optimal;

5. Menyusun regulasi terkait Sistem Inovasi Daerah;
6. Perlu adanya data terintegrasi di Pemerintah Kota Batam;
7. Penguatan Tim Satu Data;
8. Penguatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi terkemuka atau Lembaga Penelitian lainnya;
9. Penguatan institusi/ kelembagaan dan alokasi dana Penelitian dan Pengembangan di Pemerintah Kota Batam.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi Kota Batam periode 2021-2026 dirumuskan dengan memperhatikan kemajuan yang telah dicapai pemerintahan periode sebelumnya, berbagai permasalahan serta isu-isu strategis pembangunan daerah di masa mendatang. Visi pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 juga diacu dalam perumusan visi jangka menengah ini. Karenanya, maka rumusan Visi Kota Batam periode 2021-2026 adalah:

“TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA”.

Misi penyelenggaran pemerintahan Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.
2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia.
4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan Visi Misi Kota Batam di atas, Bapelitbangda Kota Batam mengemban tugas pada *Misi Kelima, yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.*

Tujuan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam selama lima tahun.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success factor*) yang telah diidentifikasi sebelumnya yakni telah memperhitungkan kelebihan/kekuatan dan kekurangan/kelemahan serta segala sumberdaya yang dimiliki, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu yang biasanya lebih dari 3 (tiga) tahun. Tujuan merupakan target kualitatif yang penetapannya telah mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan (*performance Indicator*) tugas dan fungsi Bapelitbangda Kota Batam.

Untuk mewujudkan kondisi 5 tahun kedepan sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi, konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, maka Bapelitbangda Kota Batam memiliki **tujuan** sebagai berikut :

“Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas.”

Sasaran

Dalam usaha pencapaian tujuan, langkah-langkah yang diperlukan diantaranya adalah penetapan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan target kuantitatif yang akan dicapai dalam jangka pendek yaitu dalam kegiatan operasional. Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses rencana strategis.

Sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang akan dicapai melalui tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari satu tahun, guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun kedepan, atau dengan kata lain sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Penetapan sasaran diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat dapat dicapai. ***Adapun sasaran pada Rencana Strategis Bapelitbangda Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :***

1. Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan
2. Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbang dalam mendukung perencanaan
3. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Tabel IV.1/Tabel T-C 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas			23.00	24.05	25.00	25.05	26.00	26.50
		Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai Capaian Perencanaan Kinerja	50%	60%	70%	75%	80%	85%
		Meningkatnya pemanfaatan hasil kelibangan dalam mendukung perencanaan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan	50%	50%	50%	50%	50%	50%
		Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah bagi setiap program RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah pada Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam. Identifikasi isu-isu strategis dibagi ke dalam beberapa batasan yakni internal (kekuatan dan kelemahan organisasi) dan eksternal (peluang dan acaman organisasi). Isu-isu strategis ini berasal dari beberapa isu yang kemudian ditelaah secara kritis sehingga didapatkan isu-isu strategis bagi organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam sebagai berikut :

Analisis Faktor Internal

Kekuatan yang terdiri dari :

1. Tingginya motivasi kerja pegawai
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan

3. Struktur organisasi yang mendukung
4. Ketegasan dan komitmen pimpinan dalam pengambilan keputusan

Kelemahan yang terdiri dari :

1. Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan yang sangat dinamis yang menjadi dasar penyusunan perencanaan
2. Belum optimalnya sumber daya aparatur baik kuantitas maupun kualitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar aparatur dalam penyusunan perencanaan pembangunan
4. Belum tersedianya sistem data dan informasi yang akurat

Analisis Faktor Eksternal

Peluang yang terdiri dari :

1. Banyaknya pendidikan dan pelatihan teknis dibidang perencanaan yang bisa diikuti
2. Kian meluasnya akses informasi yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun perencanaan
3. Adanya Undang-Undang dan Perda yang mengatur mengenai wewenang dan tupoksi Bapelitbangda
4. Kebijakan pemerintah pusat yang semakin mendorong daerah untuk proaktif dalam perencanaan pembangunan di daerah

Ancaman yang terdiri dari :

1. Masih rendahnya koordinasi SKPD dengan Bapelitbangda
2. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Situasi dan kondisi lingkungan yang sangat cepat berubah
4. Kurangnya sosialisai kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan di daerah

4.3.1 Formulasi Strategi

Dalam melakukan analisis isu-isu strategis ini dipergunakan teknik analisis SWOT yang mampu menelaah isu-isu strategis menjadi suatu formulasi strategi yang dipergunakan untuk penetapan kebijakan organisasi Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam yang akan diambil. Dengan menggunakan formulasi SWOT diperoleh strategi S-T, S-O, W-O dan W-T. Berikut merupakan tabel analisis isu-isu strategis.

INTERNAL	STRENGTHS/KEKUATAN	WEAKNESSES/KELEMAHAN
EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya motivasi kerja pegawai 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan 3. Struktur organisasi yang mendukung 4. Ketegasan dan komitmen pimpinan dalam pengambilan keputusan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan yang sangat dinamis yang menjadi dasar penyusunan perencanaan 2. Belum optimalnya sumber daya aparatur baik kuantitas maupun kualitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan 3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar aparatur dalam penyusunan perencanaan pembangunan 4. Belum tersedianya sistem data dan informasi yang akurat

OPPORTUNITIES/PELUANG	Strategi S-O	Strategi W-O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya pendidikan dan pelatihan teknis dibidang perencanaan yang bisa diikuti 2. Kian meluasnya akses informasi yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun perencanaan 3. Adanya Undang-Undang dan Perda yang mengatur mengenai wewenang dan tupoksi Bapelitbangda 4. Kebijakan pemerintah pusat yang semakin mendorong daerah untuk proaktif dalam perencanaan pembangunan di daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengiriman secara berkala aparatur perencana mengikuti diklat teknis 2. Peningkatan efektifitas penggunaan sarana dan prasarana 3. Peningkatan etos kerja 4. Bentuk sistem efektifitas dan efisiensi perencanaan pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan pendidikan bagi personil sesuai dengan kebutuhan 2. Penyediaan software dan database yang mendukung proses perencanaan yang transparan dan akuntabel 3. Penyusunan dokumen perencanaan dan kajian aplikatif sebagai rujukan bagi pelaksanaan pembangunan
THREATS/ANCAMAN	Strategi S-T	Strategi W-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya koordinasi SKPD dengan Bapelitbangda 2. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan 3. Situasi dan kondisi lingkungan yang sangat cepat berubah 4. Kurangnya sosialisasi kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan di daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkuat struktur organisasi dengan menempatkan personil yang handal dalam menjalankan tupoksi dan koordinasi dengan instansi terkait 2. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan 3. Ciptakan koordinasi antar aparatur dalam penyusunan perencanaan pembangunan 4. Ciptakan sistem informasi data yang akurat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan personil sesuai dengan bidang keahlian 2. Pembinaan terhadap personil yang kurang disiplin dan termotivasi 3. Perkuat kordinasi internal guna melaksanakan koordinasi dengan SKPD 4. Penyediaan sistem dan software pendukung proses perencanaan

Setelah dilakukan analisis SWOT di atas, maka didapatkan keseluruhan strategi yang dapat dipergunakan dalam mencapai tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Pengiriman secara berkala aparatur perencana mengikuti diklat teknis
2. Peningkatan efektifitas penggunaan sarana dan prasarana
3. Peningkatan etos kerja
4. Bentuk sistem efektifitas dan efisiensi perencanaan pembangunan
5. Tingkatkan pendidikan bagi personil sesuai dengan kebutuhan
6. Penyusunan dokumen perencanaan dan kajian aplikatif sebagai rujukan bagi pelaksanaan pembangunan
7. Perkuat struktur organisasi dengan menempatkan personil yang handal dalam menjalankan tupoksi dan koordinasi dengan instansi terkait
8. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan
9. Ciptakan koordinasi antar aparatur dalam penyusunan perencanaan pembangunan
10. Ciptakan sistem informasi data yang akurat
11. Penempatan personil sesuai dengan bidang keahlian
12. Pembinaan terhadap personil yang kurang disiplin dan termotivasi
13. Perkuat kordinasi internal guna melaksanakan koordinasi dengan SKPD
14. Penyediaan sistem dan software pendukung proses perencanaan

4.3.2 Kebijakan

1. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan sarana serta prasarana perencanaan pembangunan di Kota Batam
2. Meningkatkan kualitas kegiatan koordinasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi guna memperoleh umpan balik, masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) dari perencanaan pembangunan.
3. Mewujudkan penguatan dan pengembangan sistem informasi dan data dalam perencanaan pembangunan Kota Batam yang akurat, komprehensif dan selalu terbaharukan.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Pemilihan program-program pembangunan yang dilakukan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kota Batam dilakukan berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan dalam rangka percepatan proses pembangunan. Adapun prioritas program Bapelitbangda adalah sebagai berikut:

Tabel V.1/ T-C.26
Tujuan, Strategi dan Kebijakan

Visi Kota Batam : Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera		
Misi V : Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelibangan dalam mendukung perencanaan	Mengoptimalkan Pelaksanaan dan Tindak lanjut Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, Bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, serta Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		Menyelenggarakan Fasilitas, pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Bidang Aspek-Aspek Sosial
		Menyelenggarakan Fasilitas, pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum
		Peningkatan Dokumen /Kajian/Analisis/Rumusan perencanaan pembangunan yang tersusun
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan		Menyelenggarakan koordinasi sinkronisasi dan harmonisasi, serta monev antar perangkat daerah lingkup bidang PMM, Perencanaan dan SDA serta Prasana wilayah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah maupun jangka pendek (tahunan)

			Meningkatkan kualitas pelaksanaan proses perencanaan dan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan melalui koordinasi intensif dalam pelaksanaan forum PD dan Musrenbang
			Mensinergikan antara perencanaan sektoral dengan RPJP, RPJM dan RTRW.	Mengoptimalkan proses pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan dalam mendukung proses perencanaan pembangunan
			Merumuskan SPM dan dokumen perencanaan yang dibutuhkan, serta memberikan pemahaman kepada OPD lain terkait perencanaan.	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pembangunan di Perangkat Daerah melalui pembinaan/Pelatihan
			Memberdayakan SDM perencana untuk menghindari pemahaman perencanaan yang sektoral	Peningkatan skill dan kompetensi perencana melalui pendidikan dan pelatihan
				Peningkatan verifikasi kesesuaian/keselarasan indikator dan target program Renstra Perangkat Daerah terhadap target program RPJMD
				Peningkatan koordinasi dan komunikasi perencanaan lintas provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah perbatasan serta pusat terkait sinergitas program pembangunan
				Peningkatan koordinasi, komunikasi dengan perangkat daerah dalam proses perencanaan
				Peningkatan kualitas pelaksanaan musrenbang

		Meningkatkan keselarasan sasaran pembangunan lintas provinsi, nasional, dan Kabupaten/Kota dengan sasaran pembangunan hasil kesepakatan forum perencanaan pembangunan	Peningkatan Dokumen Perencanaan PD yang dievaluasi
		Meningkatkan capaian sasaran RPJMD berdasarkan kinerja rencana pembangunan tahunan	Peningkatan koordinasi, komunikasi antar PD Kota Batam dalam proses perencanaan pembangunan dalam rangka peningkatan partisipasi publik dan verifikasi bidang perencanaan sektoral
		Meningkatkan prioritas pembangunan tahunan yang dibiayai	Peningkatan koordinasi pendanaan APBN (Dekon, TP, UB) dan pengelolaan CSR
			Peningkatan Koordinasi TAPD penyusunan APBD
			Murni dan Perubahan, Penyusunan Perda APBD
	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan penyediaan data dan informasi bagi publik	Peningkatan media komunikasi publik dan sistem aplikasi berbasis IT yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan
		Meningkatkan SDM perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan	Peningkatan kerjasama diklat SDM Perencana dengan lembaga diklat dalam negeri
		Meningkatkan penggunaan sistem informasi dalam proses perencanaan pembangunan	Peningkatan pengadaan/pengembangan aplikasi perencanaan pembangunan berbasis IT

		Meningkatkan SDM perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan	Peningkatan kerjasama diklat SDM Perencana dengan lembaga diklat dalam negeri
		Meningkatkan penggunaan sistem informasi dalam proses perencanaan pembangunan	Peningkatan pengadaan/pengembangan aplikasi perencanaan pembangunan berbasis IT
		Meningkatkan SDM perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan	Peningkatan kerjasama diklat SDM Perencana dengan lembaga diklat dalam negeri
		Meningkatkan penggunaan sistem informasi dalam proses perencanaan pembangunan	Peningkatan pengadaan/pengembangan aplikasi perencanaan pembangunan berbasis IT
		Meningkatkan SDM organisasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan	Peningkatan kerjasama diklat SDM Perencana dengan lembaga diklat dalam negeri
		Meningkatkan penggunaan sistem informasi dalam proses perencanaan pembangunan	Peningkatan pengadaan/pengembangan aplikasi perencanaan pembangunan berbasis IT

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pemilihan program-program pembangunan yang dilakukan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kota Batam dilakukan berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan dalam rangka percepatan proses pembangunan. Adapun prioritas program Bapelitbangda adalah sebagai berikut:

- 1. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**
 - 1.1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**
 - 1.1.1 Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 - 1.1.2 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - 1.1.3 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota
 - 1.2 Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**
 - 1.2.1 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
 - 1.3 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**
 - 1.3.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - 1.3.2 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- 2. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
 - 2.1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**
 - 2.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2.1.2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2.1.3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - 2.2 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**
 - 2.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2.2.2 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - 2.2.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - 2.3 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**
 - 2.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

- 2.3.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- 2.3.3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- 3. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
 - 3.1 Kegiatan Penelitian, Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**
 - 3.1.1 Fasilitasi, pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 - 3.1.2 Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan
 - 3.1.3 Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah
 - 3.1.4 Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi
 - 3.2 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi**
 - 3.2.1 Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di bidang Teknologi dan Inovasi
 - 3.3 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**
 - 3.3.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
 - 3.4 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**
 - 3.4.1 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
- 4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
 - 4.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - 4.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 4.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 4.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 4.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 4.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 4.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 4.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 4.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 4.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 4.5.1 Pengadaan Mebel
 - 4.5.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

4.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

4.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

4.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

4.5.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tabel VI.1/ Tabel T-C.27
 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Bapalitbangda
 Kota Batam

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEG/SUB KEG	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD yang bertanggung jawab	Lokasi				
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				TARGET	Rp	
1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan berkualitas	2	3	4	5	6	7	23.00	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	SELUKUH BADA NG	Kota Batam	
							12,485,965.133.000	15,047,740,098.000	24.05	15,047,740,098.000	25.00	16,406,934,100.21	25.05	17,280,892,190.53	26.00	18,527,752,201.00	26.50	19,124,159,152.95	26.50	19,124,159,152.95	26.50			19,124,159,152.95
Meningkatkan kemampuan Kinerja Perencanaan Pembangunan	2	3	4	5	6	7	50%	891,143,000.000	60%	1,929,089,206.000	70%	2,026,100,049.01	75%	2,462,532,628.92	80%	2,555,901,225.61	85%	2,670,373,769.35	85%	2,670,373,769.35	85%	2,670,373,769.35	SELUKUH BADA NG	Kota Batam
							32%	891,143,000.000	1,929,089,206.000	2,026,100,049.01	2,462,532,628.92	2,555,901,225.61	2,670,373,769.35	2,670,373,769.35	2,670,373,769.35	2,670,373,769.35	2,670,373,769.35	2,670,373,769.35	2,670,373,769.35	2,670,373,769.35	2,670,373,769.35	2,670,373,769.35		

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Daerah Kota Batam yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bapeltbangda Kota Batam dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026.

Perumusan indikator kinerja Bapeltbangda Kota Batam yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026;

2. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bapeltbangda Kota Batam yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026; dan

3. Identifikasi indikator dan target kinerja Bapeltbangda Kota Batam yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja Peringkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			2021	2022	2023	2024	2025		2026	
-1			-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1.	Nilai Capaian Perencanaan Kinerja	22.09	23	24.05	25	25.05	26	26.5	26.5	26.5
2.	Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan	32%	50%	60%	70%	75%	80%	85%	85%	85%
3.	Persentase policy brief yang diimplementasikan / ditindaklanjuti	N/A	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
4.	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretaratan	N/A	82.12	82.25	82.45	82.62	82.75	82.9	82.9	82.9

BAB VIII

PENUTUP

Disusunnya RENCANA STRATEGIS (**RENSTRA**) Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam ini sebagai konsekuensi dari adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam, dengan harapan dapat memberikan arahan, bimbingan atau "guidance" serta sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja Bapelitbangda Kota Batam, karena RENSTRA merupakan pedoman dalam penyusunan RENJA-PD dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Selain itu dukungan dari semua pihak terutama jajaran staf Bapelitbangda Kota Batam, tantangan dan problema yang ada dalam pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian (Pendayagunaan sumber daya aparatur) dapat dihadapi secara bersinergi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Mudah-mudahan apa yang diinginkan dapat berjalan sesuai rencana yang akhirnya dapat mewujudkan suatu perencanaan pembangunan Kota Batam Yang berkualitas dan terintegrasi selaras dengan rencana Kota Batam untuk menciptakan " ***Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera***".